

EFEKTIVITAS PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS

**Zamzanie¹, Syarif Hidayatullah Nasution², Dadah Muliansyah³,
Sendi Sanjaya⁴, Deddi Fasmadhy Satiadharmanto^{5*}**

1,2,3,4,5 Fakultas Hukum, Universitas Tangerang Raya Tigaraksa, Kec. Tigaraksa,
Kabupaten Tangerang, Banten 15720,

Email Corresponding Author : hanyaujianini@gmail.com

Abstract

Traffic violations have become a significant issue in Indonesia, including in the Bogor region. Despite the implementation of fines as a penalty for traffic violations, the effectiveness of this penalty in reducing violations remains questionable. This study aims to analyze the effectiveness of fines as a penalty for traffic violations in the jurisdiction of the Bogor District Court. The research uses a case study approach, analyzing traffic violation data from 2022 to 2024 and conducting interviews with judges, police officers, and offenders. The findings reveal that while fines are effective in some cases, there are still factors such as low enforcement, inadequate public awareness, and insufficient deterrent effects that affect their success. The study also identifies the community's perception of the fine penalty system and suggests recommendations to enhance its effectiveness. The study concludes that improving the implementation of fines, along with increasing public education, could contribute to reducing traffic violations and promoting legal compliance.

Keywords: Traffic Violations; Fines; Legal Effectiveness; Public Perception; Traffic Law Enforcement



Khairun Law Journal is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Perlu diakui kekhawatiran yang semakin meningkat terkait pelanggaran lalu lintas dan dampaknya yang multifaset terhadap masyarakat¹. Peningkatan insiden

¹ Prabawa, P. G., Warsono, H., & Dwimawanti, I. H. (2021). Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pusat Kontrol Penegakan Pelanggaran Elektronik Lalu Lintas. In PERSPEKTIF 10 (1), p. 18). Medan Area University. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.3918>

pelanggaran lalu lintas, yang mencakup pelanggaran seperti mengemudi kendaraan tanpa dokumen yang lengkap, mengabaikan rambu-rambu lalu lintas, dan melanggar batas kecepatan yang ditentukan, menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara harapan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan kenyataan yang terjadi di lapangan². Penerapan pidana denda, meskipun dimaksudkan sebagai langkah hukuman dan pencegahan, telah menghadapi perdebatan yang cukup besar mengenai efektivitasnya dalam mengurangi pelanggaran dan mendorong kepatuhan yang lebih besar di kalangan masyarakat³. Penelitian-penelitian sebelumnya, meskipun membahas berbagai sanksi hukum, sering kali tidak fokus pada dampak yang lebih mendalam dari pidana denda terhadap kepatuhan hukum lalu lintas, khususnya dalam konteks sosial dan hukum yang unik di Bogor.

Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kekosongan tersebut dengan menggali pengaruh nyata dari sanksi denda terhadap kepatuhan lalu lintas, dengan penekanan khusus pada dinamika di dalam sistem peradilan di Bogor, tempat perkara pelanggaran lalu lintas disidangkan. Penting untuk diakui bahwa banyak faktor yang dapat menghambat atau mempercepat keberhasilan penerapan kebijakan ini, mulai dari pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan itu sendiri, hingga masalah fragmentasi, misinterpretasi publik, dan persepsi yang keliru⁴. Peran strategi komunikasi yang efektif tidak dapat dipandang sebelah mata, karena mereka menjadi dasar dalam menyebarkan informasi dan membangun pemahaman bersama tentang kebijakan di antara semua pihak terkait. Penerapan kebijakan e-ticketing, misalnya, bergantung pada komunikasi yang lancar, sumber daya yang tersedia, komitmen pihak-pihak terkait, dan kerangka birokrasi yang terstruktur dengan baik⁵. Keterlibatan langsung petugas polisi lalu lintas dengan pelanggar memperkenalkan kerentanannya, terutama potensi untuk praktik pemerasan atau kolusi, yang menekankan perlunya model penegakan hukum yang inovatif untuk memitigasi praktik korupsi.

Penggunaan solusi berbasis teknologi, seperti penegakan hukum lalu lintas elektronik, merupakan perubahan paradigma yang bertujuan untuk meminimalkan kerentanannya. Tantangan yang dihadapi lebih dari sekadar penegakan hukum, melainkan juga mencakup masalah seperti memaksimalkan pendapatan dari biaya parkir, menangani petugas parkir yang tidak sah, dan memastikan pengawasan yang memadai, yang semuanya mencerminkan sifat kebijakan yang multifaset dalam sektor transportasi. Strategi efektif untuk mengendalikan parkir ilegal adalah komponen penting dalam rencana transportasi yang baik, yang memerlukan pemahaman yang komprehensif tentang penyebab dan pola pelanggaran tersebut. Selain itu, persepsi publik memainkan peran

² Hartanti, D., Aziza, R. N., & Siswipraptini, P. C. (2019). Optimization of smart traffic lights to prevent traffic congestion using fuzzy logic. In TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control) 17 (1) : 320. Ahmad Dahlan University. <https://doi.org/10.12928/telkomnika.v17i1.10129>

³ Sarjiyati, S., Yitawati, K., & Arifin, Z. (2018). PARKING RETRIBUTION ON THE SIDE OF THE ROAD TOWARDS THE IMPROVEMENT OF LOCALLY-GENERATED REVENUE OF NGAWI REGENCY. In Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, 2 (2) : 104. <https://doi.org/10.24269/lis.v2i2.1241>

⁴ Prabawa, P. G., Warsono, H., & Dwimawanti, I. H. (2021). Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pusat Kontrol Penegakan Pelanggaran Elektronik Lalu Lintas. In PERSPEKTIF. 10 (1) : 18. Medan Area University. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.3918>

⁵ Ibid.

penting dalam membentuk sikap terhadap peraturan lalu lintas.

Pada akhirnya, efektivitas penegakan hukum bergantung pada kombinasi berbagai faktor, termasuk kesadaran publik, pendidikan, serta persepsi keadilan dan konsistensi upaya penegakan hukum. Penting untuk menumbuhkan budaya kepatuhan sukarela, di mana individu memahami pentingnya mematuhi hukum lalu lintas bukan semata-mata karena takut dihukum, tetapi sebagai tanggung jawab sosial dan keselamatan pribadi. Adopsi pendekatan sistemik yang melibatkan berbagai pihak terkait di sektor transportasi, termasuk sektor swasta, otoritas komunikasi, dan sistem kesehatan mental, berpotensi untuk menangani lebih efektif perilaku mengemudi yang teralihkan perhatian dan meningkatkan keselamatan jalan secara keseluruhan.

Lalu lintas merupakan suatu keadaan yang sering kita rasakan sehari-hari di jalanan, mulai dari berangkat sekolah, berangkat ke pasar, berangkat ke kantor, bahkan sekedar jalan-jalan, umumnya kegiatan tersebut menggunakan kendaraan bermotor, banyaknya pengguna kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas, hal ini mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Salah satu contoh kemacetan yang disebabkan oleh pelanggaran terdapat di kota Bogor, yaitu Kendala utama kemacetan di Kota Bogor adalah penegakkan hukum. Hal ini dapat dilihat di jalanan, seperti pengemudi tidak disiplin menurunkan/menaikkan penumpang tidak pada tempatnya, berhenti di tempat terlarang, pengguna jalan tidak disiplin, naik/turun di tempat terlarang. Adapun jumlah kecelakaan yang tercatat akibat pelanggaran lalu lintas yaitu Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat, pada bulan Februari 2012, sebanyak 624 dari 634 kejadian kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kelalaian pengemudi, 277 kejadian diantaranya karena pengemudi tidak tertib. Selain pelanggaran lalu lintas, kesadaran, serta pengetahuan masyarakat mengenai rambu lalu lintas merupakan beberapa permasalahan yang perlu kita cari solusinya. Kesadaran masyarakat mengenai rambu lalu lintas sangatlah rendah, bukan hanya masalah kesadaran pengetahuan mengenai rambu lalu lintas pun sangat minim, banyak masyarakat yang tidak mengetahui rambu lalu lintas yang terpampang di jalan. ⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang secara mendalam menganalisis hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku untuk memahami penerapan pidana denda dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Bogor⁷. Penelitian ini menggali norma hukum yang ada dan penerapannya dalam sistem hukum Indonesia, dengan fokus khusus pada penerapan pidana denda untuk pelanggaran lalu lintas⁸. Studi ini mengadopsi metodologi penelitian deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis efektivitas

⁶ https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/714/jbptunikompp-gdl-suhesaroma-35671-4-unikom_s-i.pdf, diakses tanggal 2 September 2025, Pukul 11.00 WIB

⁷ Prabawa, P. G., Warsono, H., & Dwimawanti, I. H. (2021). Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pusat Kontrol Penegakan Pelanggaran Elektronik Lalu Lintas. In PERSPEKTIF. 10 (1) : 18. Medan Area University. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.3918>

⁸ Rahman, I., & Nurzaman, A. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA UMUM PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI BIDANG PERPARKIRAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA. In Jurnal pendidikan Indonesia Teori Penelitian dan Inovasi. 3 (1). <https://doi.org/10.59818/jpi.v3i1.438>

penerapan pidana denda, serta mengidentifikasi faktor-faktor penting yang mempengaruhi penerapannya dalam menangani pelanggaran lalu lintas⁹. Desain penelitian ini memfasilitasi pemeriksaan menyeluruh terhadap keadaan saat ini, memberikan wawasan yang berharga tentang kekuatan dan kelemahan kerangka hukum yang ada¹⁰. Desain penelitian ini mencakup elemen deskriptif dan analitis, memungkinkan pemahaman holistik tentang materi yang dibahas. Penelitian ini mengandalkan dua sumber data utama: data primer yang dikumpulkan langsung dari informan yang relevan dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen dan literatur yang ada¹¹. Data primer dikumpulkan langsung dari informan utama, termasuk hakim, polisi lalu lintas, dan pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor, yang memberikan perspektif langsung mengenai penerapan pidana denda¹². Wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap proses penegakan hukum di lapangan digunakan untuk mengumpulkan data primer ini, memberikan wawasan kualitatif yang kaya tentang realitas praktis sistem hukum tersebut. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk dokumen hukum, literatur ilmiah, peraturan dan undang-undang yang relevan, serta penelitian sebelumnya mengenai penerapan pidana denda dalam sistem hukum lalu lintas, untuk memastikan pemahaman yang komprehensif terhadap basis pengetahuan yang ada¹³.

Pendekatan komprehensif ini dalam pengumpulan data memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, kajian dokumen, dan observasi langsung untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh terhadap materi yang dibahas. Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam penegakan hukum lalu lintas, termasuk hakim, polisi lalu lintas, dan pelanggar lalu lintas, untuk menangkap spektrum luas perspektif mengenai efektivitas dan tantangan yang terkait dengan penerapan pidana denda¹⁴. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam mengenai efektivitas pidana denda sebagai pencegah, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, dan kemungkinan jalan perbaikan¹⁵.

Kajian dokumen melibatkan tinjauan menyeluruh terhadap peraturan dan undang-undang yang relevan, laporan kasus pelanggaran lalu lintas, serta penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian ini, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konteks hukum dan akademis yang menyelimuti topik penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan observasi terhadap penerapan pidana denda secara praktis, yang memberikan wawasan berharga mengenai realitas penegakan hukum di lapangan¹⁶. Peneliti

⁹ Ibid.

¹⁰ Wulandari, F., & Waluyo, W. (2020). Efektivitas Pemanfaatan Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam Bidang Kesehatan di Kota Surakarta Tahun 2018. In *BESTUUR*. 7 (2) : 15. Sebelas Maret University. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.28418>

¹¹ Sarjiyati, S., Yitawati, K., & Arifin, Z. (2018). PARKING RETRIBUTION ON THE SIDE OF THE ROAD TOWARDS THE IMPROVEMENT OF LOCALLY-GENERATED REVENUE OF NGAWI REGENCY. In *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*. 2 (2) : 104. <https://doi.org/10.24269/lis.v2i2.1241>

¹² Ibid.

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Pramita, P., Rochmah, S., & Pratiwi, R. (2014). The Implementation of Integrated One-Stop Service at Licensing Service Agency in Order to Improve Licensing Service to Society (Case Study On

menggunakan observasi untuk secara sistematis mengamati dan mencatat objek yang sedang diteliti¹⁷. Dengan mengintegrasikan berbagai metode pengumpulan data ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang mendalam dan komprehensif tentang efektivitas pidana denda dalam menangani pelanggaran lalu lintas. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam analisis penelitian ini, di mana analisis data dilakukan secara deskriptif yang merujuk pada masalah tertentu dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁸.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan empiris yang dihasilkan dari penelitian ini, yang berfokus pada Pengadilan Negeri Bogor, membuka tabir kompleksitas penerapan pidana denda sebagai alat untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini menunjukkan adanya korelasi yang cukup signifikan antara besar denda yang dikenakan dengan tingkat kepatuhan pelanggar terhadap peraturan lalu lintas. Semakin tinggi denda yang dijatuhkan, semakin besar pula kecenderungan pelanggar untuk tidak mengulangi pelanggaran yang sama¹⁹.

Hasil ini sejalan dengan teori ekonomi hukum yang menyatakan bahwa besaran denda harus cukup besar untuk memberikan efek jera, namun tetap proporsional dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Selain itu, temuan ini juga mengindikasikan perlunya perbaikan dalam sistem penegakan hukum, khususnya dalam penyesuaian besaran denda yang lebih relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Penerapan denda yang terlalu rendah atau tidak konsisten dapat mengurangi efek deterrent atau pencegahan. Di sisi lain, penerapan yang terlalu tinggi dapat menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, keberhasilan sistem pidana denda sebagai alat pengurangan pelanggaran lalu lintas harus memperhatikan aspek keseimbangan antara kepatuhan hukum dan keadilan sosial dalam penerapannya.

Temuan ini konsisten dengan teori deterrence, yang menyatakan bahwa pemberian sanksi yang cukup berat, jika dipandang serius, mampu menekan perilaku yang tidak diinginkan²⁰. Akan tetapi, efek pencegahan yang ditimbulkan oleh denda moneter ini tidak bersifat mutlak dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan oleh pelanggar.

Penerapan e-ticketing (e-tilang) di Bogor telah membawa kemajuan signifikan dalam sistem pembayaran denda pelanggaran lalu lintas. Sistem ini memungkinkan proses penegakan hukum yang lebih efisien, transparan, dan

Business License Service At Investment And Integrated Licensing Service Agency (IILSA) Of Pasuruan City). In *Wacana Jurnal Sosial dan Humaniora*. 17 (3) : 149. Brawijaya University. <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2014.017.03.5>

¹⁷ Ibid

¹⁸ Saputra, C. W. (2019). The pre-trial application granted in the case of Budi Gunawan. In *Jurnal Hukum Volkgeist*. 4 (1) : 63. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v4i1.478>

¹⁹ Rahman, I., & Nurzaman, A. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA UMUM PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI BIDANG PERPARKIRAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA. In *Jurnal pendidikan Indonesia Teori Penelitian dan Inovasi*. 3 (1). <https://doi.org/10.59818/jpi.v3i1.438>

²⁰ Blæhr, E. E., Væggemose, U., & Sogaard, R. (2018). Effectiveness and cost-effectiveness of fining non-attendance at public hospitals: a randomised controlled trial from Danish outpatient clinics. In *BMJ Open*. 8 (4). BMJ. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-019969>

mempermudah warga untuk melakukan pembayaran denda tanpa harus menghadapi birokrasi yang rumit. Dengan kemudahan ini, tingkat kepatuhan pelanggar terhadap peraturan lalu lintas meningkat, karena denda dapat dibayar langsung melalui platform elektronik yang terintegrasi.

Namun, meskipun teknologi ini menawarkan berbagai kemudahan, masih ada kesenjangan pemahaman yang cukup besar di kalangan masyarakat mengenai cara kerja dan manfaat dari e-ticketing. Banyak warga yang belum sepenuhnya memahami bagaimana cara mengakses dan menggunakan sistem ini, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi digital. Upaya besar diperlukan untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran publik terkait sistem ini.

Tabel 1

Penerapan e-ticketing (e-tilang) di Bogor, keuntungannya, dan tantangan terkait pemahaman masyarakat dan literasi digital

Aspek	Deskripsi
Kemajuan Penerapan e-Ticketing	Penerapan sistem e-ticketing (e-tilang) di Bogor membawa kemajuan signifikan dalam sistem pembayaran denda pelanggaran lalu lintas.
Efisiensi dan Transparansi	Sistem ini memungkinkan proses penegakan hukum yang lebih efisien dan transparan, mengurangi birokrasi.
Kemudahan Pembayaran Denda	Warga dapat membayar denda langsung melalui platform elektronik yang terintegrasi tanpa harus mengunjungi kantor.
Peningkatan Kepatuhan	Dengan kemudahan akses dan pembayaran, tingkat kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas meningkat.
Kesenjangan Pemahaman	Masih ada kesenjangan pemahaman yang besar di kalangan masyarakat mengenai cara kerja dan manfaat e-ticketing.
Literasi Digital	Upaya besar diperlukan untuk meningkatkan literasi digital agar masyarakat dapat mengakses dan menggunakan sistem ini dengan baik.
Pendidikan dan Sosialisasi	Sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif diperlukan untuk menjembatani kesenjangan pemahaman, terutama bagi mereka yang kurang familiar dengan teknologi.

Tabel ini merangkum **keuntungan** dan **tantangan** yang dihadapi dalam penerapan e-ticketing di Bogor, serta pentingnya edukasi dan peningkatan literasi digital bagi masyarakat.

Sosialisasi yang intensif serta penyuluhan tentang prosedur penggunaan e-ticketing harus dilakukan secara menyeluruh agar seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, dapat memanfaatkan teknologi ini secara optimal demi tercapainya penegakan hukum yang lebih efektif dan merata. Temuan ini tidak hanya relevan dalam konteks penegakan hukum lalu lintas saja, tetapi juga memberikan pandangan lebih luas mengenai penerapan sanksi moneter dalam berbagai sektor regulasi. Keberhasilan e-ticketing, misalnya, sangat bergantung pada penyelesaian masalah literasi teknologi dan akses terhadap infrastruktur

pembayaran digital, yang merupakan prasyarat utama untuk efektivitasnya²¹.

Penelitian ini juga menyoroti hubungan antara faktor ekonomi, sosial, dan perilaku kepatuhan, yang mengharuskan pembuat kebijakan untuk mengembangkan pendekatan lebih menyeluruh dalam penegakan hukum lalu lintas. Ini bukan hanya soal memberi sanksi, tetapi juga melibatkan strategi rehabilitatif dan preventif yang mendalam. Pemahaman yang lebih utuh tentang hal ini sangat krusial bagi perumusan kebijakan yang bisa mengatasi akar masalah pelanggaran lalu lintas dan membangun budaya berkendara yang lebih bertanggung jawab. Tidak kalah penting, temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menerima pidana denda sebagai bentuk regulasi yang sah, asalkan langkah-langkah tersebut dianggap adil, transparan, dan diterapkan secara konsisten²².

Tabel 2

Hubungan antara faktor ekonomi, sosial, dan perilaku kepatuhan dalam penegakan hukum lalu lintas, serta pentingnya pendekatan yang lebih menyeluruh dalam kebijakan yang melibatkan sanksi, rehabilitasi, dan pencegahan.

Aspek	Deskripsi
Faktor Ekonomi	Pengaruh kondisi ekonomi terhadap kepatuhan masyarakat dalam mematuhi hukum lalu lintas, seperti kemampuan untuk membayar denda.
Faktor Sosial	Peran faktor sosial dalam membentuk perilaku masyarakat terhadap aturan lalu lintas, seperti norma sosial yang ada di masyarakat.
Perilaku Kepatuhan	Bagaimana individu mematuhi atau melanggar aturan lalu lintas berdasarkan faktor ekonomi, sosial, dan pribadi.
Pendekatan Penegakan Hukum	Tidak hanya sanksi, tetapi juga strategi rehabilitatif dan preventif yang mendalam untuk membangun kesadaran dan budaya berkendara yang bertanggung jawab.
Pentingnya Pemahaman yang Utuh	Untuk merumuskan kebijakan yang dapat mengatasi akar masalah pelanggaran lalu lintas, memahami faktor-faktor penyebab pelanggaran menjadi kunci.
Penerimaan Pidana Denda	Masyarakat cenderung menerima pidana denda sebagai bentuk regulasi yang sah, asalkan dianggap adil, transparan, dan diterapkan secara konsisten.
Kebijakan yang Adil dan Transparan	Keberhasilan kebijakan penegakan hukum lalu lintas sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diterima oleh masyarakat, terutama dalam hal keadilan dan konsistensi.

²¹ Prabawa, P. G., Warsono, H., & Dwimawanti, I. H. (2021). Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pusat Kontrol Penegakan Pelanggaran Elektronik Lalu Lintas. In PERSPEKTIF. 10 (1) : 18. Medan Area University. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.3918>

²² Blæhr, E. E., Væggemose, U., & Søgård, R. (2018). Effectiveness and cost-effectiveness of fining non-attendance at public hospitals: a randomised controlled trial from Danish outpatient clinics. In BMJ Open. 8 (4). BMJ. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-019969>

Tabel ini merangkum hasil penelitian yang menekankan bahwa penegakan hukum lalu lintas perlu melibatkan lebih dari sekadar pemberian sanksi, dengan menyoroti peran faktor ekonomi, sosial, dan perilaku dalam membangun kebijakan yang efektif.

Hambatan dalam implementasi e-ticketing, seperti waktu yang dibutuhkan untuk memahami kebijakan, ketidakkonsistenan penerapan, serta kesalahpahaman publik, menunjukkan betapa pentingnya aspek komunikasi dan edukasi. Tidak cukup hanya dengan menerapkan sistem teknologi canggih, publik harus benar-benar memahami alasan di balik kebijakan ini dan cara penggunaannya secara benar²³. Mengatasi tantangan ini melalui penyuluhan dan pendidikan publik yang lebih terarah akan berkontribusi besar pada keberhasilan kebijakan tersebut²⁴. Pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini, dengan desain deskriptif dan analisis data kualitatif, memberikan wawasan mendalam yang berorientasi pada konteks dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan pidana denda dalam penegakan hukum lalu lintas.

Tabel 3

Hambatan dalam implementasi e-ticketing serta pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian, yang berfokus pada komunikasi, edukasi publik, dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan pidana denda.

Aspek	Deskripsi
Hambatan Implementasi e-Ticketing	Tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem e-ticketing dalam penegakan hukum lalu lintas.
Waktu Pemahaman Kebijakan	Proses yang dibutuhkan publik untuk memahami kebijakan e-ticketing yang diterapkan, yang memerlukan waktu.
Ketidakkonsistenan Penerapan	Ketidaksesuaian dalam penerapan kebijakan antara berbagai pihak atau wilayah yang berbeda.
Kesalahpahaman Publik	Miskomunikasi atau kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan mekanisme sistem e-ticketing.
Peran Komunikasi dan Edukasi	Pentingnya penyuluhan dan pendidikan publik untuk memperjelas kebijakan e-ticketing dan cara penggunaannya.
Metodologi Penelitian	Pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif yang memberikan wawasan mendalam mengenai efektivitas kebijakan.

²³ Prabawa, P. G., Warsono, H., & Dwimawanti, I. H. (2021). Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pusat Kontrol Penegakan Pelanggaran Elektronik Lalu Lintas. In PERSPEKTIF. 10 (1) : 18. Medan Area University. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.3918>

²⁴ Ibid.

Aspek	Deskripsi
Efektivitas Penerapan Pidana Denda	Fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan denda sebagai hukuman dalam penegakan hukum lalu lintas.

Tabel ini memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan dalam implementasi e-ticketing serta metodologi penelitian yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitasnya.

Hasil penelitian ini memperkaya pengetahuan yang berkembang tentang efektivitas pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum lalu lintas. Penegakan hukum parkir, misalnya, terkait erat dengan pelanggaran lalu lintas dan menjadi bagian penting dalam kebijakan transportasi perkotaan²⁵. Pelanggaran parkir ilegal bisa mengakibatkan penurunan kecepatan lalu lintas, kemacetan, pilihan moda transportasi yang tidak efisien, hingga kecelakaan²⁶.

Tabel 4

Hubungan antara penegakan hukum parkir, pelanggaran lalu lintas, dan dampak-dampak negatif seperti kemacetan, penurunan kecepatan, pilihan moda transportasi yang tidak efisien, dan kecelakaan.

Aspek	Deskripsi
Penegakan Hukum Parkir	Penegakan hukum terkait parkir yang tidak sesuai aturan di area-area tertentu.
Pelanggaran Lalu Lintas	Pelanggaran yang terjadi akibat parkir ilegal, seperti kendaraan yang parkir sembarangan.
Dampak Kemacetan	Pelanggaran parkir ilegal mengakibatkan kemacetan lalu lintas, memperlambat aliran kendaraan.
Penurunan Kecepatan Lalu Lintas	Adanya kendaraan yang terparkir secara ilegal di jalan mengurangi kelancaran, menyebabkan penurunan kecepatan.
Pilihan Moda Transportasi Tidak Efisien	Pelanggaran parkir dapat memaksa pengguna transportasi beralih ke moda yang lebih tidak efisien.
Kecelakaan	Parkir ilegal dapat mengganggu pandangan pengemudi atau menimbulkan bahaya yang meningkatkan risiko kecelakaan.

Tabel ini menyajikan hubungan sebab-akibat yang jelas antara **penegakan hukum parkir** dan berbagai **dampak negatif** yang ditimbulkan oleh pelanggaran parkir.

Kebijakan yang efektif untuk mengontrol parkir ilegal harus menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap rencana transportasi yang bijaksana²⁷. Untuk menangani

²⁵ Cullinane, K., & Polak, J. (1992). Illegal parking and the enforcement of parking regulations: causes, effects and interactions. In *Transport Reviews*, 12 (1) : 49. Taylor & Francis. <https://doi.org/10.1080/01441649208716803>

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid.

parkir kendaraan komersial ilegal, kebijakan penegakan hukum ditentukan oleh denda yang dikenakan serta tingkat penegakan hukum itu sendiri²⁸. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penegakan hukum yang ada sudah cukup efektif dalam menangani beberapa pelanggaran parkir ilegal²⁹. Meskipun fokus penelitian ini adalah pada penegakan parkir, prinsip-prinsip tentang deterrence dan kepatuhan yang ditemukan tetap relevan dengan pelanggaran lalu lintas secara lebih umum.

Penelitian mengenai penegakan hukum lalu lintas dan penerapan e-ticketing di Bogor memberikan pemahaman mendalam mengenai tantangan dan peluang yang ada dalam sistem penegakan hukum lalu lintas. Hasil penelitian ini menyoroti berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, serta bagaimana teknologi, seperti e-ticketing, dapat memberikan solusi untuk memperbaiki sistem yang ada. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama terkait dengan kesenjangan pemahaman masyarakat, literasi digital, dan komunikasi kebijakan yang efektif.

Penegakan Hukum Parkir dan Dampak Lalu Lintas

Salah satu aspek yang sangat penting dalam penegakan hukum lalu lintas adalah penegakan hukum parkir. Penelitian menunjukkan bahwa parkir ilegal sering kali menjadi penyebab utama kemacetan lalu lintas, yang berdampak pada penurunan kecepatan lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan. Kendaraan yang terparkir sembarangan sering kali menghalangi jalur kendaraan lain, menyebabkan gangguan pada arus lalu lintas dan memperburuk kemacetan di kota-kota besar seperti Bogor. Dampak lebih lanjut dari pelanggaran parkir ini adalah pilihan moda transportasi yang tidak efisien, di mana masyarakat terpaksa menggunakan kendaraan pribadi yang memperparah kemacetan. Oleh karena itu, penegakan hukum parkir yang tegas dan konsisten menjadi sangat penting untuk meningkatkan keselamatan jalan raya dan kelancaran arus lalu lintas.

Implementasi E-Ticketing (e-Tilang) di Bogor

Penerapan e-ticketing di Bogor telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam hal transparansi dan efisiensi dalam penegakan hukum lalu lintas. Sistem e-ticketing memungkinkan warga untuk membayar denda pelanggaran lalu lintas secara langsung melalui platform digital, tanpa harus menghadapi proses birokrasi yang rumit. Hal ini membuat proses penegakan hukum menjadi lebih efisien dan lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang sibuk dan tidak memiliki waktu untuk datang ke kantor polisi atau melakukan pembayaran secara manual.

Namun, meskipun teknologi ini menawarkan berbagai kemudahan, masih ada kesenjangan pemahaman yang cukup besar di kalangan masyarakat. Banyak warga yang belum sepenuhnya memahami bagaimana cara mengakses dan menggunakan sistem e-ticketing, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi digital. Literasi digital menjadi tantangan besar dalam implementasi sistem ini.

²⁸ Nourinejad, M., & Roorda, M. J. (2016). Parking enforcement policies for commercial vehicles. In *Transportation Research Part A Policy and Practice*, 102 : 33). Elsevier BV. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2016.04.007>

²⁹ Cullinane, K., & Polak, J. (1992). Illegal parking and the enforcement of parking regulations: causes, effects and interactions. In *Transport Reviews*, 12 (1) : 49. Taylor & Francis. <https://doi.org/10.1080/01441649208716803>

Masyarakat yang belum familiar dengan teknologi cenderung merasa kesulitan untuk menggunakan sistem ini, yang berpotensi menghambat efektivitas penerapannya. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan sistem ini dengan baik.

Faktor Ekonomi, Sosial, dan Perilaku Kepatuhan

Penelitian ini juga menyoroti hubungan antara faktor ekonomi, sosial, dan perilaku kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Faktor ekonomi, seperti kemampuan membayar denda, memainkan peran penting dalam kepatuhan terhadap hukum lalu lintas. Orang yang memiliki keterbatasan ekonomi mungkin kesulitan untuk membayar denda, yang dapat menyebabkan mereka mengabaikan atau melanggar aturan lalu lintas berulang kali. Selain itu, faktor sosial juga mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap hukum. Dalam banyak kasus, norma sosial yang berkembang dalam masyarakat turut mempengaruhi sikap masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas. Di beberapa lingkungan sosial, melanggar aturan lalu lintas mungkin dianggap sebagai hal yang wajar, yang membuat individu tidak merasa perlu untuk patuh.

Penelitian ini juga menekankan bahwa pendekatan penegakan hukum yang hanya mengandalkan sanksi denda tidak cukup untuk mengubah perilaku masyarakat. Pendekatan yang lebih holistik diperlukan, yang melibatkan pendidikan dan kampanye keselamatan, serta pendekatan rehabilitatif yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Misalnya, memberikan pelatihan atau kursus berkendara yang aman dan efektif dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas, yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pelanggaran.

Tantangan dan Solusi dalam Penerapan E-Ticketing

Sistem e-ticketing di Bogor, meskipun membawa banyak manfaat, juga menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal pemahaman publik. Beberapa segmen masyarakat masih kesulitan memahami cara menggunakan sistem ini, dan masih ada ketidakpastian mengenai cara mengaksesnya. Pendidikan digital menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini, karena dengan meningkatnya literasi digital masyarakat, mereka akan lebih siap untuk menerima dan menggunakan sistem e-ticketing dengan efektif. Pemerintah dan pihak terkait perlu memperbanyak program sosialisasi dan pelatihan digital untuk memastikan bahwa tidak ada segmen masyarakat yang tertinggal dalam menggunakan teknologi ini. Sosialisasi yang tepat dapat membantu masyarakat memahami manfaat e-ticketing dan mengurangi kesalahpahaman yang ada.

KESIMPULAN

Penerapan pidana denda terhadap kepatuhan terhadap hukum lalu lintas, terutama ketika besaran denda yang dijatuhkan lebih tinggi, sejalan dengan prinsip-prinsip teori deterrence dalam hukum lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi biaya dari pelanggaran lalu lintas, ketika diperberat dengan denda yang signifikan, secara efektif dapat mencegah potensi pelanggaran. Selain itu, penerapan sistem e-ticketing di Bogor menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, yang menunjukkan potensi

mekanisme penegakan hukum berbasis teknologi. Namun, penelitian ini juga mengakui adanya hambatan yang ada, terutama terkait pemahaman dan aksesibilitas publik terhadap teknologi ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun solusi teknologi menawarkan potensi besar, efektivitasnya sangat bergantung pada kemudahan penggunaan dan pemahaman yang luas di kalangan masyarakat. Implikasi teoretis dari penelitian ini meluas pada teori deterrence dalam hukum lalu lintas, di mana penerapan sanksi moneter secara jelas dapat mengurangi pelanggaran. Pengaruh faktor sosial-ekonomi dan pemahaman publik sangatlah penting sebagai penentu utama dalam membentuk efektivitas kebijakan semacam ini. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sumber yang sangat berharga untuk penyempurnaan teori-teori sanksi dalam sistem peradilan pidana, khususnya terkait penegakan hukum lalu lintas. Kebijakan transportasi perkotaan semakin menyadari penegakan parkir sebagai elemen penting. Parkir ilegal dapat mengakibatkan penurunan kecepatan lalu lintas, kemacetan, perubahan pilihan moda transportasi, hilangnya pendapatan dari ruang parkir yang sah, penurunan rasa hormat terhadap hukum, dan bahkan kecelakaan. Keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan pemahaman yang jelas terhadap faktor-faktor pendorong dan penghambat, yang mencakup waktu yang dibutuhkan untuk memahami kebijakan, fragmentasi, salah tafsir publik, dan persepsi yang keliru³⁰.

REFERENSI

Jurnal

Blæhr, E. E., Væggemose, U., & Søgaaard, R. (2018). Effectiveness and cost-effectiveness of fining non-attendance at public hospitals: a randomised controlled trial from Danish outpatient clinics. *BMJ Open*. 8(4). BMJ. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-019969>

Cullinane, K., & Polak, J. (1992). Illegal parking and the enforcement of parking regulations: causes, effects and interactions. *Transport Reviews*. 12(1) : 49. Taylor & Francis. <https://doi.org/10.1080/01441649208716803>

Hartanti, D., Aziza, R. N., & Siswipraptini, P. C. (2019). Optimization of smart traffic lights to prevent traffic congestion using fuzzy logic. In *TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control)*. 17 (1) : 320). Ahmad Dahlan University. <https://doi.org/10.12928/telkomnika.v17i1.10129>

KR, M. Y. A. R. A., Hartanto, H., Fatoni, M. A., Hermiyetti, H., & Kartika, R. A. S. (2023). Improving Teacher Performance By Implementing Reward and Punishment Effective and Measurable Program. *Journal on Education*. 6 (1) : 1058. Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.3040>

Nourinejad, M., & Roorda, M. J. (2016). Parking enforcement policies for commercial vehicles. *Transportation Research Part A Policy and Practice*. 102 : 33. Elsevier BV.

³⁰ Prabawa, P. G., Warsono, H., & Dwimawanti, I. H. (2021). Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pusat Kontrol Penegakan Pelanggaran Elektronik Lalu Lintas. In *PERSPEKTIF* (Vol. 10, Issue 1, p. 18). Medan Area University. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.3918>

<https://doi.org/10.1016/j.tra.2016.04.007>

Prabawa, P. G., Warsono, H., & Dwimawanti, I. H. (2021). Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pusat Kontrol Penegakan Pelanggaran Elektronik Lalu Lintas. In PERSPEKTIF. 10 (1) : 18. Medan Area University. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.3918>

Pramita, P., Rochmah, S., & Pratiwi, R. (2014). The Implementation of Integrated One-Stop Service at Licensing Service Agency in Order to Improve Licensing Service to Society (Case Study On Business License Service At Investment And Integrated Licensing Service Agency (IILSA) Of Pasuruan City). In Wacana Jurnal Sosial dan Humaniora. 17 (3) : 149. Brawijaya University. <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2014.017.03.5>

Rahman, I., & Nurzaman, A. (2023). Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Bidang Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. In Jurnal Pendidikan Indonesia Teori Penelitian dan Inovasi. 3(1). <https://doi.org/10.59818/jpi.v3i1.438>

Sarjiyati, S., Yitawati, K., & Arifin, Z. (2018). Parking Retribution on the Side of the Road Towards the Improvement of Locally-Generated Revenue of Ngawi Regency. In Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum. 2 (2) : 104. <https://doi.org/10.24269/lis.v2i2.1241>

Wulandari, F., & Waluyo, W. (2020). Efektivitas Pemanfaatan Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam Bidang Kesehatan di Kota Surakarta Tahun 2018. In BESTUUR 7(2) : 15. Sebelas Maret University. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.28418>

Website

https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/714/jbptunikompp-gdl-suhesaroma-35671-4-unikom_s-i.pdf,